

Pertanyaan buat Arif Soeleman Siregar

Siapa Perusak Lingkungan?

BELAKANGAN ini muncul gagasan dari sebagian masyarakat agar dilakukan renegotiasi bagi hasil antara investor asing dan pemerintah. Salah satunya adalah M Fajroel Rachman dalam wawancara serupa di rubrik ini pada Kamis (7/6) lalu. Intinya, pemerintah harus mendapatkan keuntungan lebih besar dari hasil pertambangan dan minyak bumi yang dibiayai asing.

Namun, Arif Soeleman Siregar, Presiden Direktur PT INCO --perusahaan asal Brasil yang mengeksploitasi mineral di Sulawesi Tenggara-- menilai tidak perlu ada renegotiasi itu karena menyangkut etika bisnis internasional. Adakah jalan tengah? Bagaimana halnya kontrak karya antara Pemerintah RI dan PT INCO yang bakal berakhir 31 Maret 2008? Bagaimana pula dengan dugaan PT INCO melakukan perusakan hutan lindung di Karebe, Sulawesi Tenggara, dan hendak melakukan barter tanah dengan kehutanan?

Untuk mengupas duduk perkara sesungguhnya, berikut wawancara *Jurnal Nasional* dengan Arif di kantornya, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (11/6) lalu:

Bisa diceritakan sampai Anda bisa menjabat Presiden Direktur & CEO PT INCO?

Saya kuliah Metalurgi di IITB tahun 1973. Lulus, saya kerja macam-macam di pertambangan. Saya pikir harus mengambil *post graduate*. Saya ambil S2 dan S3 di Queensland University, Australia. Usai studi, saya kembali bekerja di pertambangan. Kalau dihitung-hitung, saya sudah bekerja 27 tahun.

Saya bekerja di Rio Tinto sebagai Presiden Direktur dari tahun 2003 hingga 2006. Kemudian saya *resign*. Lalu saya dilamar oleh INCO pada akhir 2006. Harganya cocok, ya sudah bekerja sampai sekarang.

Perasaan Anda melihat kekayaan Indonesia dieksploitasi oleh asing seperti INCO?

Menurut survei, Indonesia itu nomor enam paling kaya potensi mineralnya di dunia. Tapi itu kan potensi yang masih di dalam tanah. Kedalamannya bisa 1.000 meter. Tidak berfungsi apa-apa kalau tidak dimanfaatkan demi kemakmuran bangsa. Tapi, negara kita tidak memiliki cukup *capital* dan kualifikasi SDM untuk menggantinya.

Tahun 60-an, Soekarno punya gagasan mengundang investor asing sebab investor dari dalam memang tidak jalan. Termasuk Freeport pernah diundang. Waktu itu sistemnya tender dan INCO juga mendapatkan tender. Sebelum beliau jatuh, negosiasi kontrak karya sudah terjadi. Kalau berbicara orang asing dan dalam negeri, pada saat itu orang dalam tidak mampu.

Mungkinkah investor diajak renegotiasi *sharing* hasil seperti dilakukan Presiden Bolivia, Juan Evo Morales Ayma, supaya bangsa ini mendapatkan hasil lebih. Sebagai orang Indonesia, apa tidak tergerak menggagas *review*?

Renegosiasi apa nasionalisasi? Menurut saya, Morales itu sama dengan Hugo Chavez dari Venezuela, melakukan nasionalisasi. Itu namanya meng-

ambil alih. Bagi saya tidak ada renegotiasi. Yang ada itu isunya Departemen Pertambangan supaya *me-review* royalti dari kontrak karya kedua yang sudah ditandatangani. Tapi itu pun belum saya balas. Saya belum terima suratnya. Kontrak karya pertama akan berakhir 31 Maret 2008. Sudah lumrah dalam kontrak pertambangan bahwa 10 tahun sebelum berakhir kontrak, dilakukan negosiasi untuk perpanjangan.

Betul saya orang Indonesia, tapi saya juga seorang profesional. Kalau mau bicara profesional, apa yang sudah kita tandatangi itu adalah final. Misalnya begini, kamu mau menyewa rumah saya selama lima tahun, sewanya sejuta setahun. Tiba-tiba di tahun kedua, saya menaikkan harga, apa Anda mau terima? Tapi ini memang belum terjadi, belum berbicara dengan Dirjen Pertambangan. Jadi, yang kami bicarakan *review royalti* itu untuk kontrak karya yang kedua yang sudah ditandatangani 10 tahun lalu.

Kok bisa ditandatangani 10 tahun lalu, yang pertama saja kan belum selesai?

Pertambangan ini kan biaya investasinya sangat besar. Paling sedikit US\$500 juta. Dalam 30 tahun belum tentu balik modal. Jadi kalau saya mau investasi dan tahu 10 tahun ke depan tambangnya akan habis, tentu saya tidak mau investasi. Itu hanya membuang uang. Karena itu, untuk mengetahui potensinya, di pertambangan sudah lumrah dilakukan negosiasi 10 tahun sebelum habis kontrak pertama sebab butuh waktu untuk penelitian. Prosesnya lama dan berbelit-belit.

PT INCO diduga merusak hutan lindung di Karebe, Sulawesi Tenggara, ini bagaimana?

Ah, *you* dapat informasi saja sudah salah. Itu sebenarnya di luar kontrak karya. Di sebelah hutan lindung ada proyek kami. Namanya Proyek Karebe. Kami ingin menggu-

nakan hutan lindung untuk area *support utilities project* karena proyek kami dekat dari situ.

Kemarin memang ada terkena sedikit hutan lindung, sekitar empat hektare. Jadi kami stop itu proyek. Terus kami negosiasi dengan kehutanan. Bagaimana kalau hutan itu kami pakai, *toh* luasnya *kan* hanya 195 hektare. Untuk rumah memang luas, tapi untuk tambang itu tidak ada apa-apanya. Kehutanan setuju, tapi diminta mencarikan tanah penggantinya dua kali lipat. Kami carikan dan sudah dapat. Sekarang dalam proses tukar kepemilikan.

Mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan, eksploitasi alam ini memperkaya atau memperlakiskan Indonesia?

Ya memperkaya! Saya tidak yakin membuat miskin. Yang merusak lingkungan itu siapa? *Kan* ada ketentuan yang dibuat pemerintah dan investor harus mengikuti ketentuan itu. Begitu eksploitasi sudah selesai, tanahnya harus ditanami kembali, dipelihara, dan tanahnya dikembalikan lagi ke pemerintah.

Coba *you* perhatikan tambang itu cenderung di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh masyarakat. Ini akan menjadi ujung tombak pembangunan daerah. Waktu masuk ke sana, belum ada apa-apa di situ. Dia harus bikin *airport*

sendiri, pelabuhan sendiri, jalan sendiri. Dia harus bangun kota, listrik, dan lain-lain. Sekarang sudah ada kota di sana, dengan fasilitas rumah sakit, sekolah, air bersih, listrik. Ini kan memperkaya.

Manfaat lain, kami setor. Ada 13 komponen setoran, mulai dari pajak dan *bla, bla, bla*. INCO misalnya, dari pajak membayar US\$ 215 juta. Tahun kemarin, total INCO menyeter kepada pemerintah lebih dari US\$400 juta. Apa ini bukan manfaat? *You* mustinya bertanya, dikemanakan uang itu? *Nah*, itu jangan tanyakan ke saya.

Tapi, akhirnya Anda jadi ter-sangka perusakan hutan lindung, *kan*?

Itu *kan* Kepolisian Luwu Timur melihat ada peluang untuk menangkap saya karena dalam proses tukar tanah itu memang ada uangnya. Orang kehutanan sendiri tidak *ngomong* apa-apa.

Anda berpengalaman di pertambangan. Bagaimana kalau suatu hari ada presiden meminta Anda menjadi menteri pertambangan?

Itu diukur dari manfaatnya secara nasional. Kalau memang ada manfaatnya, kenapa tidak? Kalau saya lebih berfungsi di sana daripada di INCO, ya boleh-boleh saja.

Selain kerja, apa hobi Anda, kesenian misalnya?

Hobi saya sebenarnya kerja. Waktu luang saya main golf untuk olahraga. Di bidang kesenian, saya tidak memiliki bakat atau mungkin belum tergali, *ha...ha...ha...* Apalagi ya?

■ Doddi Ahmad Fauji



Biodata

Nama : Arif Soeleman Siregar
Lahir : Padangsidempuan, Sumatera Utara, 19 Desember 1952
Nama Istri : Hardini
Anak : Arvan RR Siregar (25), Leonardy PN Siregar (23)

Pendidikan

1. Jurusan Metalurgi dan Pertambangan, Institut Teknologi Bandung (lulus 1980)
 2. Doktoral Program Metalurgi, University of Queensland, Australia (lulus 1992)
 3. Program Manajerial Harvard Business School, Amerika Serikat (selesai 1998)

Pengalaman Kerja

1. Presiden Direktur dan CEO PT International Nickel Indonesia, Tbk (Inco) (2006 - sekarang)
 2. Presiden Direktur PT Kellan Equatorial Mining (KEM) yang 90% sahamnya dimiliki Rio Tinto (2003 - 2006)
 3. Wakil Presiden Direktur PT Rio Tinto Indonesia (2003)
 4. Manajer Umum Palabora Mining Company (PMC), Afrika Utara (2000 - 2003)
 5. Manajer Umum PT Kaltim Prima Coal (KPC), Indonesia (1998 - 2003), dan masih banyak lagi

Organisasi

1. Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia (2005 - sekarang)
 2. Anggota Tetap Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Wakil Ketua Komisi Energi (2005 - sekarang)
 3. Ketua Komisi Penerbitan IMA (2003 - sekarang)
 4. Dewan Penasehat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), (2003 - sekarang)
 5. Ketua Perhapi - Sangatta (1996 - 1997)
 6. Ketua Dewan Penyantun Perhimpunan Pendidikan Indonesia Australia (1989 - 1990).